

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Guru sebagai tenaga profesional memiliki eksistensi yang penting dalam bidang pendidikan, khususnya dalam menyelenggarakan pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menjelaskan Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dituntut memiliki kompetensi tinggi agar mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan baik karena salah satu keberhasilan pembelajaran salah satunya faktornya adalah kualitas dari guru. Tingginya kualitas pendidikan suatu negara akan berdampak pada kualitas sumber daya manusianya secara langsung. Oleh karenanya pendidikan menjadi salah satu investasi terbesar negara untuk menciptakan generasi yang unggul dan berkualitas. Sejalan dengan kutipan dari McKinsey berbunyi, *“The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers”* (dalam Herman, 2024. hlm. 3).

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Jawa Barat tahun 2023 mengemukakan bahwa masih banyak tenaga pendidik yang belum bersertifikat. Data menunjukkan terdapat tenaga pendidik sebesar 66,2% (SD), 64,6% (SMP), 60,1% (SMA), dan 72,6% (SMK) yang belum memiliki sertifikasi. Padahal guru yang berkualitas, kompeten, dan profesional sangat dibutuhkan karena peserta didik saat ini semakin beragam dan tuntutan pendidikan juga semakin tinggi (Fitriyah, 2019). Guru perlu menghadapi tantangan-tantangan pendidikan yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Menurut Zaenal, seperti yang dikutip dalam (Muizzuddin, 2019), guru perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Sejalan dengan tujuan dari pendidikan dan pelatihan yang diungkapkan oleh Michael R. Carrel (dalam Nisa, 2023) yang menyatakan bahwa tujuan diklat ialah memperbaiki kualitas kinerja dan meningkatkan keterampilan. Dengan begitu tenaga pendidik perlu mengikuti program diklat guna meningkatkan kompetensi.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran adalah dengan meluncurkan program diklat bagi guru, yaitu menyelenggarakan program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) sebagai salah satu turunan dari program Sekolah Penggerak. Hal ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh Kemendikbud untuk mencapai pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dalam mendukung kualitas pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020-2024.

Pendidikan Guru Penggerak (untuk selanjutnya disebut PGP) merupakan salah satu program merdeka belajar yang dimaksudkan sebagai pelatihan bagi calon Guru Penggerak yang dicanangkan tanggal 3 Juli 2020. Menteri Pendidikan Indonesia pada tahun 2021-2024, Nadiem Anwar Makarim, memperkenalkan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi calon guru yang bermaksud untuk mencetak Guru Penggerak melalui pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan bimbingan selama 6 hingga 9 bulan. Ditjen GTK menyatakan PGP ini adalah program pendidikan dan pelatihan yang tidak terpisahkan dari Merdeka Belajar untuk menyiapkan para calon pemimpin di bidang pendidikan, seperti kepala sekolah, pengawas, dan juga instruktur.

Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) adalah lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Program PGP yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak. BBGP berperan dalam pengembangan dan

pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, serta pengawas sekolah. Menurut Yoseptri dkk. (2024), BBGP memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, dalam pengembangan profesionalisme pendidik dan peningkatan mutu pendidikan.

SMA Negeri 1 Soreang merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat di mana tenaga pendidiknya mengikuti program Pendidikan Guru Penggerak pada angkatan ke 9. Yang mana hal ini dapat menjadi kesempatan untuk para tenaga pendidik meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Tidak hanya itu, guru yang telah dinyatakan lulus PGP akan menjadi guru penggerak yang memiliki peran sebagai agen perubahan untuk menghadapi tantangan pendidikan (Husni, 2022). Guru Penggerak juga memikul tanggung jawab besar untuk memimpin, menginspirasi, dan membimbing siswa serta kolega mereka menuju keberhasilan akademis dan pribadi (Pratama, dkk., 2024).

Sebagai agen perubahan, Guru Penggerak dituntut memiliki kompetensi yang solid agar mampu menjalankan tugasnya di sekolah secara optimal demi memaksimalkan kualitas pembelajaran. Kenyataan di lapangan ternyata menunjukkan bahwa nilai indikator kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan di SMA Negeri 1 Soreang pada tahun 2023 belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Berikut merupakan nilai indikator kualitas pembelajarannya:

Tabel 1.1 Nilai Kualitas Pembelajaran di SMAN 1 Soreang

No.	Indikator	Capaian	Skor
D.1	Kualitas Pembelajaran	Sedang	64,42
D.1.1	Manajemen Kelas		67,19
D.1.2	Dukungan Psikologis		64,78
D.1.3	Metode Pembelajaran		61,28

Data Sumber: Rapor Pendidikan SMA Negeri 1 Soreang 2023

Data di atas menunjukkan bahwa nilai kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Soreang berada pada capaian sedang. Demikian juga dengan nilai rerata kualitas pembelajaran di Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat yang belum mencapai target dan nilainya masih tergolong rendah. Berikut merupakan nilai rerata indikatornya yang tertera dalam Rapor Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2023:

Tabel 1.2 Nilai Rerata Kualitas Pembelajaran di Jawa Barat

Jenjang	Nilai Rerata Kabupaten Bandung	Nilai Rerata Jawa Barat
SMA	59,47	62,48
SMK	58,25	58,47
SLB	56,83	53,91

Data Sumber: Synk.Disdik.Jabar

Data menunjukkan nilai rerata jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bandung memiliki gap sebesar 3,01 dengan nilai rerata di Jawa Barat. Hal tersebut mengindikasikan belum tercapainya target kualitas pembelajaran. Padahal dengan adanya program PGP ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik agar kualitas pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang masih belum maksimal dapat menjadi keraguan dari keberhasilan program PGP. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Bapak Aam, selaku Jabatan Fungsional Pustakawan di Dinas Pendidikan Jawa Barat, beliau menegaskan bahwa perlu adanya peningkatan peran dari Guru Penggerak untuk menggerakkan tidak hanya peserta didiknya saja tetapi rekan sejawat guru di sekolah pun digerakkan agar bisa bersama-sama menciptakan perubahan pendidikan.

Sampai pada semester 2 tahun 2024, program PGP telah meluluskan 92.887 Guru Penggerak di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah Guru Penggerak di Jawa Barat sejumlah 3.478 Guru Penggerak yang berasal dari angkatan 9 dengan waktu kelulusan di bulan Mei 2024. Meskipun telah meluluskan banyak Guru Penggerak, dampak yang diharapkan dari program

pendidikan Guru Penggerak belum terlihat secara jelas menurut penelitian yang dilakukan Hermawan (2024).

Dalam Kepdirjen GTK Nomor 1302/B/PD.00.02/2022 tentang Pedoman Pendidikan Guru Penggerak, disebutkan bahwa terdapat penilaian terhadap penyelenggaraan PGP untuk mengetahui efektivitas program PGP salah satunya yaitu ketercapaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan program serta kepuasan peserta terhadap layanan diklat. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk mencari tahu apakah program PGP sudah dapat menghasilkan Guru Penggerak sebagai agen perubahan dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas atau belum. Hal ini karena hasil evaluasi dapat memengaruhi terhadap efektivitas dari program tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan di BBGP Provinsi Jawa Barat, peneliti menemukan hasil evaluasi dan monitoring PGP angkatan 9. Tim evaluasi di bidang PGP menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan yaitu dengan menyebar angket pada peserta diklat setelah pelaksanaan lokakarya sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan diklat. Hal-hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan PGP di angkatan 9, yaitu sebagai berikut: 1) Masih terdapat Pengajar Praktik (PP) yang melaksanakan Pendampingan Individu (PI) tidak sesuai dengan ketentuan atau moderasi, 2) Manajemen waktu peserta diklat yang masih kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan PGP, 3) Adanya gangguan teknis dan kendala internet pada saat pelaksanaan diklat secara daring menggunakan LMS. 4) Kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah selama pelaksanaan PGP.

Untuk mengetahui efektivitas suatu program, dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kegiatan program tersebut. Menurut Kirkpatrick dalam Rahmawati (2017) menjelaskan bahwa evaluasi efektivitas program pelatihan dapat dilakukan dengan menggunakan empat tingkat yang terdapat dalam model Kirkpatrick. Model evaluasi ini kini menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam menilai program diklat. Dengan menggunakan metode ini, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif sebagai dasar untuk menilai dan memperbaiki suatu program diklat.

Evaluasi yang dilakukan oleh BBGP Jawa Barat masih berupa penyebaran angket pada setiap kegiatan lokakarya yang dilakukan. Sehingga hasil yang didapat hanya berupa sudut pandang permasalahan dari peserta diklat saja dan belum secara mendalam. Sehingga peneliti menemukan urgensi untuk mengevaluasi program PGP pada angkatan ke 9 dengan model evaluasi kirkpatrick terhadap pelaksanaan PGP di SMA Negeri 1 Soreang sebagai lokasi penelitian ini. Peneliti akan menggunakan model evaluasi kirkpatrick pada level 1 sampai level 3 mengingat Guru Penggerak pada angkatan 9 belum genap 1 (satu) tahun setelah lulus dari program PGP. Dengan begitu Peneliti akan fokus pada level 1 reaksi, level 2 pembelajaran, dan level 3 sikap.

Data-data yang telah dipaparkan, dimulai dari keraguan akan keberhasilan PGP serta berbagai hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan PGP menjadi alasan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan program PGP angkatan ke-9 di SMA Negeri 1 Soreang. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menjadi masukan bagi penyelenggara diklat dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik, khususnya Guru Penggerak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai efektivitas Program PGP angkatan ke-9 di SMA Negeri 1 Soreang. Penelitian ini menggunakan pendekatan model evaluasi Kirkpatrick pada ketiga level Kirkpatrick, sehingga peneliti mengangkat judul “Efektivitas Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 9 Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick di SMA Negeri 1 Soreang”.

## **1.2 Batasan Masalah**

### **1.2.1 Batasan Masalah Konseptual**

Pada penelitian ini batasan masalah konseptualnya adalah mengetahui efektivitas program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) menggunakan model evaluasi kirkpatrick pada level 1 sampai level 3, yaitu sebagai berikut:

1. *Reaction* atau reaksi ini difokuskan pada kepuasan peserta diklat dari segi waktu dan tempat pelaksanaan program;
2. *Learning* atau pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana perubahan sikap, pemahaman pengetahuan serta peningkatan keterampilan; dan
3. *Behavior* atau perubahan perilaku dilihat dari bagaimana peserta PGP dalam mengimplementasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di tempat kerja.

### 1.2.2 Batasan Masalah Kontekstual

Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PGP angkatan 9 di SMA Negeri 1 Soreang.

## 1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan adalah:

1. Bagaimana efektivitas program PGP angkatan 9 di SMAN 1 Soreang berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick pada level 1 (*reaction*)?
2. Bagaimana efektivitas program PGP angkatan 9 di SMAN 1 Soreang berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick pada level 2 (*learning*)?
3. Bagaimana efektivitas program PGP angkatan 9 di SMAN 1 Soreang berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick pada level 3 (*behavior*)?

## 1.4 Tujuan Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami keilmuan administrasi pendidikan khususnya pada konsentrasi manajemen pendidikan dan pelatihan dan evaluasi program pendidikan serta memperoleh pengetahuan mengenai efektivitas pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di SMA Negeri 1 Soreang menggunakan evaluasi kirkpatrick pada level 1 - level 3.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana efektivitas program PGP angkatan 9 di SMAN 1 Soreang berdasarkan model evaluasi kirkpatrick pada level 1 (*reaction*);

2. Mengetahui bagaimana efektivitas program PGP angkatan 9 di SMAN 1 Soreang berdasarkan model evaluasi kirkpatrick pada level 2 (*learning*);
3. Mengetahui bagaimana efektivitas program PGP angkatan 9 di SMAN 1 Soreang berdasarkan model evaluasi kirkpatrick pada level 3 (*behavior*);

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pihak lain dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan. Adapun manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pengembangan ilmu Administrasi Pendidikan, terutama dalam hal evaluasi program pendidikan serta manajemen pendidikan dan pelatihan.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti: penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta wawasan dalam keilmuan Administrasi Pendidikan, khususnya terkait evaluasi program pendidikan serta manajemen pendidikan dan pelatihan baik secara teori maupun praktik.
2. Bagi Sekolah: diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah dan tenaga pendidik untuk mengoptimalkan peran Guru Penggerak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
3. Bagi Penyelenggara Diklat: diharapkan menjadi acuan atau bahan masukan dalam peningkatan dan perbaikan sistem pelaksanaan program diklat tenaga pendidik serupa.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian kedepannya, khususnya terkait evaluasi program pendidikan serta manajemen pendidikan dan pelatihan.